

BAB III

**DATA PENELITIAN TENTANG PERANAN PERSERIKATAN BANGSA
BANGSA (PBB) DALAM MENJALANKAN MISI PASUKAN PENJAGA
PERDAMIAN DI TIMOR TIMUR**

A. Awal mula keterlibatan PBB

Timor-Timur atau lebih dikenal dengan nama Timor Leste merupakan sebuah Negara yang terletak di sebelah Timur Pulau Timor dan berada di sebelah utara Australia. Timor Leste merupakan daerah jajahan Portugis dan tidak termasuk dalam bagian daerah Indonesia dalam perjanjian apapun dengan Belanda. Pada tahun 1975 ketika terjadi revolusi bunga di Portugis yang menyebabkan Portugis kehilangan kontrolnya secara langsung atas Timor Leste mendorong kelompok-kelompok atau partai lokal pro kemerdekaan di Timor Leste untuk kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste. Kelompok tersebut antara lain UDT (*Uniao Democratice Timorese*) dan ASDT (*Asociacao Social Democrata de Timor*). Namun dalam prosesnya hal ini tidak berlangsung mulus karena terdapat pertentangan dari kelompok masyarakat lainnya yang melihat peluang bergabung dengan Republik Indonesia. Kelompok ini antara lain APODETI (*Associacao Popular Democratica Timorese*) dan KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain*) atau yang dikenal sebagai kesatria putra Timor. Kondisi ini menimbulkan situasi perang 104 saudara antara pihak yang mendukung kemerdekaan Timor Leste dan pro integrasi Indonesia. Menurut catatan PBB

setidaknya ada 60.000 warga sipil meninggal akibat konflik tersebut. Selama konflik saudara tersebut mulailah muncul berbagai pendapat tentang penyatuan kembali masyarakat Timor yang terpecah akibat kolonisasi Indonesia yang merasa bahwa secara kultural Timor Leste merupakan bagian dari masyarakat Indonesia berpandangan perlu membantu “saudara” nya tersebut keluar dari konflik membawa Indonesia pada kebijakan intervensi langsung penyelesaian konflik. Situasi inilah yang dikenal sebagai bentuk invasi Indonesia di tanah Timor Loro Sae. Sejak tahun 1976 Timor Leste masuk dalam kerangka wilayah NKRI sebagai propinsi ke 27 dengan nama Timor Timur. Sejarah menunjukkan bahwa Timor Leste merupakan daerah sarat konflik yang melibatkan antar warganya. Banyak sekali konflik yang terjadi dalam rentang waktu setiap perubahan struktur sosialnya. Dalam catatan sejarah, setidaknya ada 3 momentum perubahan struktur sosial Masyarakat Timor Leste yang juga menyuarakan konflik antar warganya. Pertama, pemberontakan terhadap pendudukan Portugis di timor leste pada abad ke 19. Pada saat itu Portugis dengan politik belah bambunya memecah rakyat Timor Leste. Kedua, pada gerakan kemerdekaan yang menanggapi “revolusi bunga” tahun 1975 di portugis. Revolusi bunga yang terjadi mengakibatkan portugis kehilangan kontrolnya di Timor Leste. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mendeklarasikan diri menjadi negara merdeka, namun hal itu juga banyak di tentang oleh rakyat Timor Leste lainnya yang memilih opsi untuk berintegrasi dengan Indonesia. Dengan adanya invasi Indonesia sejak saat itu Timor Leste menjadi bagian dari

Republik Indonesia. Ketiga, pada pasca referendum yang menegaskan kemerdekaan Timor Leste tahun 1999. Banyak pihak yang kurang puas terhadap hasil referendum yang menyulut konflik terbuka kembali menyeruak. Di masa Timor Leste berada dalam kerangka Republik Indonesia. Peperangan terjadi antara rakyat pro integrasi dibantu TNI dengan para pemberontak yang tak lain adalah sisa para pejuang Fretilin yang pro kemerdekaan. Perjuangan para sisa pro kemerdekaan berlangsung dari tahun 1976 sampai tahun 1999. Perjuangan rakyat pro kemerdekaan mengalami titik balik kebangkitannya setelah peristiwa penembakan oleh aparat TNI di Pemakaman Santa Cruz pada tahun 1991 yang menarik perhatian dunia terutama Australia, serta memacu rakyat Timor Leste untuk memerdekakan diri. Konflik-konflik ini menimbulkan banyak korban, setidaknya ± 100.000 orang menjadi korban dari rentang waktu 1976-1999. Angka ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Timor Leste adalah konflik yang massif. Konflik yang massif tentu saja akan memberikan kerugian. Beberapa di antaranya :

1. Hancurnya sumber-sumber kehidupan, harta serta mata pencaharian penduduk.
2. Ketidakpastian keamanan.
3. Secara Psikologis menimbulkan rasa takut, curiga berkepanjangan.
4. Hancurnya Pranata Sosial Masyarakat. Pandangan tersebut memberikan gambaran kerugian yang di derita oleh rakyat Timor Leste.

Selama kurun waktu 1976-1999 rakyat Timor Leste senantiasa

dirundung rasa takut dan curiga satu sama lain. Ketidak pastian keamanan karena seringnya konflik yang tiba-tiba terjadi. Hancurnya infrastruktur yang memutus akses mata pencaharian rakyat Timor Leste. Kerugian dan konflik yang berkepanjangan ini kemudian mengundang perhatian masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB yang selama ini tidak mengakui intergrasi Timor Leste ke Indonesia, mulai berperan pada saat situasi dan kondisi di Timor Leste memanas. Ketika rezim soeharto di Indonesia runtuh dan para pejuang kemerdekaan kembali menuntut kemerdekaan. Keadaan ini membuat PBB merasa perlu untuk melakukan evaluasi politik dan keamanan. Peran dan Strategi PBB Serta Evolusinya Seperti diketahui bahwa konflik yang terjadi di Timor Leste melibatkan dua kelompok masyarakat yang terbagi secara ideologis, pro kemerdekaan dan pro integrasi Indonesia. Konflik keduanya merupakan sebuah konflik panjang yang diwarnai dengan berbagai peristiwa seperti pembunuhan, kekerasan, serta teror yang bukan hanya terjadi pada dua kelompok itu saja namun juga rakyat Timor Leste pada umumnya. Setidaknya 18.600 rakyat sipil menjadi korban perseteruan dua kelompok tersebut. Konflik keduanya memuncak pada tahun 1998, tepatnya saat pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas di Timor Leste mengalami krisis politik. Krisis politik ini dimanfaatkan oleh pihak pro kemerdekaan untuk menggalang kekuatan menuntut kemerdekaan. Hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Dengan dibantu oleh rakyat pro integrasi Indonesia. pemerintah Indonesia bermaksud untuk mempertahankan

otoritasnya. Konflik terbuka pun terjadi, banyak orang menjadi korban sehingga mengundang perhatian dunia. PBB, sebagai Organisasi Internasional yang merupakan perpanjangan tangan dari negara-negara dunia mencoba masuk untuk melakukan tindakan pengamanan. Setelah melalui perundingan dengan pemerintah Indonesia, akhirnya PBB diizinkan masuk oleh pemerintah Indonesia. Kemudian sesuai dengan mandat DK PBB dengan resolusi 1246 tahun 1999 kemudian dimodifikasi dan diperpanjang dalam resolusi 1257 tahun yang sama dan resolusi 1262 beberapa bulan kemudian, maka dibentuk team atau institusi ad hoc yang dinamakan *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) sekaligus menjadi nama misi PBB, dengan mandat untuk melakukan monitoring serta melaksanakan jejak pendapat. UNAMET terdiri dari para ahli dengan komposisi 1.148 staf internasional, 275 polisi internasional serta 4000 pegawai dalam negeri (Timor Leste). Keterlibatan UNAMET ini membuka jalan penyelesaian konflik di Timor Leste. Pada prosesnya dalam menjalankan mandat, UNAMET melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis (pemerintah otoritas Timor Leste yang diakui PBB) serta pihak pro kemerdekaan. Langkah ini dinilai sebagai langkah tepat, akhirnya tercapai kesepakatan untuk melakukan jejak pendapat. Jejak pendapat menunjukkan bahwa 78% rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka dan lepas dari pemerintah Indonesia. Sampai di titik ini solusi terhadap konflik antara rakyat Timor Leste pro integrasi Indonesia dan pro kemerdekaan telah tercapai secara de facto. Namun, konflik atau kekerasan antara kedua pihak

ini belum habis. Atas dasar penolakan terhadap hasil jejak pendapat, konflik terbuka kembali terjadi dan bahkan semakin brutal. Sikap saling memusuhi dan balas dendam satu sama lain pun semakin memperparah keadaan. Sikap ini terjadi karena konflik sudah terjadi begitu lama yang disertai tindak kekerasan (penganiayaan, pembunuhan) yang terjadi selama konflik. Situasi tersebut menuntut PBB untuk bertindak dan menurunkan pasukan perdamaian (Peace Enforcement). Melalui resolusi 1264 DK PBB kemudian menurunkan pasukan penjaga perdamaian, hal ini sesuai mandat yang tertuang dalam Chapter VII of UN Charter, di mana PBB dituntut berperan dalam pengelolaan perdamaian dan keamanan dunia. Pasukan Perdamaian PBB kemudian hadir diawali oleh International Force in East Timor (INTERFET) satuan pasukan gabungan di luar koordinasi PBB yang kemudian bersama pasukan perdamaian PBB memiliki mandat untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di Timor Leste, menjaga serta mendukung UNAMET dan organisasi internasional lain yang fokus pada bantuan kemanusiaan melalui kapabilitas militernya, dan sebagai fasilitator operasi kemanusiaan. Pasukan PBB dan INTERFET terdiri dari 11.000 tentara dari 22 negara dengan pimpinan komando dibawah Australia. Masuknya pasukan PBB dan INTERFET ke Timor Leste, diharapkan mampu melakukan stabilisasi situasi soial masyarakat yang pada saat itu sedang mengalami kekacauan. Pasukan PBB and INTERFET kemudian melakukan beberapa tindakan, pertama mereka membuka aduan masyarakat sipil terhadap kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh milisi pro integrasi

Indonesia, membuat daftar orang hilang, tahanan politik serta melakukan penahanan terhadap orang-orang yang diduga kuat terlibat tindak kekerasan (dalam hal ini pihak pro integrasi Indonesia). Langkah-langkah ini di nilai subjektif dan cenderung merugikan masyarakat pro integrasi Indonesia, akibatnya banyak masyarakat pro integrasi Indonesia meninggalkan Timor Leste. Di luar penilaian tersebut, pasukan PBB dan INTERFET telah berhasil menciptakan situasi damai meskipun dalam konotasi negative yakni ketidakadaan perang (*The Absence of war*). Dengan pengawalan pasukan perdamaian PBB dan INTERFET, UNAMET telah berhasil memenuhi mandat sampai dengan berakhirnya UNAMET pada akhir tahun 1999. Berakhirnya UNAMET tidak menjadikan peran PBB berakhir, namun bertransformasi pada hal lain sebagaimana menjadi concern pada kebutuhan daerah misi. Sejak akhir tahun 1999 melalui resolusi 1392 dibentuklah United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dengan mandat mengawal Timor Leste dalam membangun negara mandiri pasca jejak pendapat. Dalam tugasnya, UNTAET mengemban program-program peacekeeping dan peacebuliding. Agenda UNTAET dalam program-program tersebut antara lain :

- 1. To provide security and maintain law and order throughout the territory of East Timor.*
- 2. To establish an effective administration.*
- 3. To assist in the development of civil and social services.*

4. *To ensure the coordination and delivery of humanitarian assistance, rehabilitation and development assistance.*
5. *To support capacity-building for self-government.*
6. *To assist in the establishment of conditions for sustainable development.*

Merujuk pada tugas di atas, PBB kemudian membentuk pemerintahan transisi serta mengupayakan pembangunan perdamaian pasca konflik *Post Conflict Peace Building* dengan melakukan upaya restrukturisasi ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, dll melalui badan-badan yang ada dibawahnya^{44,44}. UNTAET kemudian menjadi kepala pengawasan rencana badan-badan di bawah PBB yang turut serta dalam upaya pembangunan perdamaian di Timor Leste. Badan-badan yang ikut berperan dalam pembangunan perdamaian pasca konflik antara lain, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dengan tugas menyediakan sumber bahan, tempat tinggal, kesehatan dan kebersihan bagi para pengungsi. *The United Nation Children's Fund (UNICEF)* dalam pembangunan fasilitas air bersih. *United Nation Development Program (UNDP)* dalam perbaikan jalan. *World Health Organization (WHO)* dalam pembangunan kesehatan. *United Nations Military*

⁴⁴ Laporan Kemajuan Timor-timur pada Februari Tahun 2000. Pemerintahan Transisi PBB di Timor Leste. Hal.1-2.

Observer (UNMO) dalam memantau situasi keamanan. Agenda *Peacebuliding* (Pembangunan perdamaian) pasca konflik lintas sektor memang menjadi perhatian tersendiri bagi PBB yang melihat pentingnya hal tersebut. Seperti yang pernah dikatakan oleh Sekjen PBB Kofi Annan : *“In recent years, the international community has come to recognize that conflict resolution calls for a comprehensive approach in which parties emerging from conflict require assistance not only in negotiating peace agreements, but also in building and consolidating peace. That means providing humanitarian and reconstruction assistance, ensuring security and security-sector reform, promoting good governance, and in the broadest sense demonstrating to people that peace brings real dividends – improvements in their standards of living, in their sense of opportunity, and in the way their societies function. The recent establishment of a new United Nations Peacebuilding Commission is an important step in this regard.”*

Dari situ dapat dilihat bahwa PBB sebagai sebuah organisasi internasional sadar bahwa upaya pembangunan perdamaian merupakan langkah awal dari proses stabilisasi pasca konflik. Oleh karenanya proses pembangunan perdamaian menjadi fokus perhatian PBB, sehingga keterlibatan PBB melalui UNTAET mengarahkan rencana pembangunan pada proyek *peacebuliding*. Setelah UNTAET dengan program *peacekeeping* dan *peacebulding*-nya, Peran PBB kembali bertransformasi melalui resolusi

DK PBB 1410 diperpanjang dengan 1473 dibentuklah United Nations Mission of Support in East Timor (UNIMSET). Dengan mandat fokus pada keamanan, pertahanan juga hukum melalui program seperti pengawasan pemerintah Timor Leste yang baru terbentuk dan membentuk rencana sistem pengamanan negara. UNIMSET didukung oleh lebih dari 200 orang penasehat ahli untuk mendukung pemerintah Timor Leste yang baru terbentuk. Mandat UNIMSET berakhir pada tahun 2005. Pasca UNIMSET, PBB kemudian membentuk institusi dalam upaya mendukung pemerintah Timor Leste dan kepolisian Timor Leste. Melalui resolusi DK PBB 1599, maka dibentuklah United Nations Office in Timor Leste (UNOTIL). Mandat yang berlaku untuk UNOTIL sebenarnya kepanjangan dari UNIMSET, hanya saja kemudian mandat tersebut lebih dibatasi pada program-program Peacebuilding. Asumsinya karena situasi Timor Leste sudah kondusif. UNOTIL berakhir pada tahun 2006. Secara garis besar, Peran PBB di Timor Leste telah mendukung program Peacemaking, Peacekeeping, dan Peacebuilding yang dituangkan dalam institusi atau badan ad hoc yang dibentuk oleh PBB. Dengan demikian kita melihat evolusi atau transformasi peran yang dimainkan PBB berdasarkan pada prioritas yang perlu dilakukan. Perubahan peran dapat digambarkan sebagai berikut :

Masa Bentukan	Periode Waktu	Mandat
<i>UNAMET</i>	11 Juni 1999 – 25 Okt 1999	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring • Mempersiapkan dan menyelenggarakan jejak pendapat
<i>Pasukan Perdamain</i>	15 Sept 1999 – 23 Feb	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penjagaan

<i>PBB dan INTERFET</i>	2000	perdamaian <ul style="list-style-type: none"> • Mengawal pelaksanaan jejak pendapat
<i>UNTAET</i>	25 Okt 1999 – 20 Mei 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program-program <i>peacebuilding</i> • Melakukan administrasi transisi pemerintahan • Menyelenggarakan pemilu • Melakukan penjagaan perdamaian
<i>UNIMSET</i>	20 Mei 2002 – 20 Mei 2005	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawalan terhadap pemerintahan yang baru terbentuk • Membentuk rencana sistem pengamanan negara, termasuk kepolisian
<i>UNOTIL</i>	20 Mei 2005 – 25 Agustus 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pengamanan dan kepolisian Timor Leste

B. Dampak Peran Signifikan PBB

Berangkat dari pemikiran Chadwick F. Alger yang berpendapat : *“it is vitally necessary that the various dimensions be assembled, as is the need in efforts to develop long-range peace-building strategies.”* Maka dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan strategi pembangunan perdamaian dibutuhkan berbagai dimensi. Dengan kata lain dimensi-dimensi yang ada saling berhubungan satu sama lain dan tidak dispisahkan dalam proses pembangunan perdamaian. Apa yang dilakukan PBB, dengan keterlibatan badan-badannya secara langsung yang notabene berbeda secara kerja dan

model serta metodenya – menyajikan berbagai dimensi analisis sesuai dengan objek dan cara kerja masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan UNHCR yang melakukan pendekatan psikologis dalam mengatasi permasalahan psikologis para pengungsi, dan di sisi lain UNDP hadir dengan metode pelatihan dalam menciptakan masyarakat yang terampil. Penggunaan multi metode dengan banyak dimensi didalamnya, akan menjadi strategi pembangunan perdamaian jangka panjang dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai sektor. Badan-badan PBB dengan metodenya menjadi usaha dalam menciptakan stabilitas pasca konflik. Sejumlah permasalahan pasca referendum kemerdekaan di Timor Leste bermunculan. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain : rusaknya infrastruktur (jalan, air bersih), hilangnya mata pencaharian, perekonomian yang tidak stabil, Rusaknya tatanan sosial masyarakat (dalam hal ini rusaknya relasi antara masyarakat Timor Leste yang terbagi ke dalam dua kelompok, pro kemerdekaan dan pro integrasi Indonesia). secara umum, permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dialami oleh negara transisi. PBB kemudian melakukan langkah-langkah pembangunan perdamaian sesaat setelah referendum berjalan. Pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, ekonomi, kemanusiaan, keamanan, pengembangan masyarakat, serta pembangunan politik.

1. Pembangunan Infrastruktur Sejumlah infrastruktur rusak parah, kerusakan terjadi dimana-mana terutama pada saat-saat menjelang referendum.

Tidak tercatat secara pasti berapa besar kerusakan infrastruktur yang ada. Ini mengindikasikan bahwa kondisi infrastruktur pasti sangat memprihatinkan. UNTAET sebagai ujung tombak misi PBB mengorganisir badan-badan PBB antara lain, UNDP, UNICEF dan WHO melakukan pembangunan infrastruktur seperti, pembangunan dan perbaikan jalan yang pengerjaannya dapat dilangsungkan dengan adanya bantuan dana dari ADB (Asian Development Bank) dan Australia, pembangunan fasilitas air bersih, listrik melalui kerjasama PBB dengan Northern Territory's Power and Water Authority-Australia, pembangunan fasilitas kesehatan. Dampaknya Infrastruktur tersebut dapat dibangun sehingga kebutuhan rakyat Timor Leste dapat terpenuhi. Yang menjadi catatan dari pembangunan infrastruktur ini adalah pembangunan difokuskan pada daerah atau wilayah central dengan kondisi infrastruktur yang memadai. Artinya pembangunan infrastruktur masih terbatas.

2. Pelayanan Sosial Pelayanan Sosial mencakup sektor pendidikan dan kesehatan.

Di sektor pendidikan rekrutmen guru dilakukan dan rehabilitasi sekolah. Setidaknya ada 6000 guru yang direkrut dan disalurkan ke seluruh wilayah Timor Leste. Seluruh guru tersebut diangkat menjadi pegawai negeri yang digaji oleh otoritas UNTAET sebagai perwakilan PBB di Timor Leste. Dampaknya tercatat lebih dari 173.000 siswa terdaftar dan mengikuti proses belajar mengajar. Angka ini lebih 6000 orang lebih banyak dari jumlah siswa yang terdaftar terakhir pada saat

pemerintah Indonesia masih memerintah. Di sektor kesehatan. WHO dan UNICEF melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat Timor Leste dan melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya malaria. Kemudian di bantu oleh LSM asing 114 seperti Caritas, MSF France, melakukan investigasi terhadap masyarakat yang terjangkit Encephalitis dan melakukan tindakan preventive agar tidak meluas. Dengan dilakukannya kegiatan tersebut, angka penderita serta kematian akibat malaria dan Encephalitis dapat di tekan.

3. Pembangunan Sektor Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat. Di sektor ekonomi, penekanan terhadap akses tenaga kerja menjadi kunci.
4. Sebelumnya banyak sekali pengangguran, oleh karenanya PBB membangun pusat jasa tenaga kerja, dengan harapan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pekerjaan. Selain itu PBB mendirikan komunitaskomunitas tenaga kerja dan memberikan pelatihan serta proyek pembangunan skala kecil. Hasilnya lebih dari 140 proyek skala kecil terlaksana dengan menyerap setidaknya 4.400 orang. Ini menjelaskan pembangunan ekonomi berbasis komunitas seperti apa yang dikatakan oleh Lambang Trijono, bahwa pembangunan sebagai perdamaian berbasiskan komunitas.
5. Pembangunan Sektor Keamanan Sektor keamanan adalah sektor paling penting dalam proses stabilisasi dan untuk kasus Timor Leste sektor ini adalah sektor paling di sorot.

Oleh karenanya PBB sangat memperhatikan sektor ini. Dilihat dari evolusi dan transformasi tugas PBB dimulai dengan INTERFET sampai dengan UNIMSET (1999-2005) tidak lepas dari perhatian sektor keamanan. Salah satunya dengan menempatkan pasukan penjaga perdamaian dalam waktu yang lama dengan tujuan mencegah dan meminimalisir konflik dan menciptakan rasa aman bagi Rakyat Timor Leste. Bahkan pada masa UNTAET (1999-2002), UNTAET mengendalikan seluruh organisasi militer resmi Timor Leste. Pengendalian di bawah UNTAET ini dengan alasan sebagai upaya untuk membentuk bingkai pertahanan di Timor Leste serta mendukung proses DDR (Disarmament, Demobilization, dan Reintegration). Sektor ini memang menjadi pusat perhatian PBB, sehingga PBB tidak segan untuk menurunkan Pengamat Militer PBB (UMNO) secara khusus untuk memantau terus perkembangan situasi keamanan di Timor Leste. Dari langkah-langkah tersebut dapat dikatakan bahwa PBB telah berhasil menciptakan rasa aman bagi rakyat di Timor Leste. Hal ini dapat dilihat dari kembalinya ratusan rakyat dari tempat-tempat pengungsian dan persembunyian ke daerah-daerah yang sebelumnya rawan konflik.

6. Pembangunan Politik Sebagai sebuah negara baru dan sedang bertransisi, diperlukan upaya pembangunan politik dengan tujuan membentuk model dan sistem pemerintahan.

Dalam hal ini PBB menawarkan dua model transisi pemerintahan. Pertama, model teknokratik di mana PBB menawarkan peralihan secara

berangsur-angsur. Kedua, model politik di mana sebuah kabinet di bentuk dengan pemimpin UNTAET dan Timor Leste berbagi kekuasaan. Model kedua ini menjadi pilihan bagi transisi pemerintahan Timor Leste. Dari sisi ini pembangunan politik tercapai dengan baik, dapat dilihat dengan terciptanya suatu pemerintahan transisi. Dari penjelasan pembangunan di sektor-sektor tersebut. Secara umum pembangunan perdamaian dilihat dari konteks pembangunan infrastruktur telah mencapai hasil yang baik dan berdampak signifikan terhadap terciptanya stabilitas Timor Leste. Pembangunan perdamaian ditinjau dari prinsip dan metode pun telah terpenuhi. Di mana di dalamnya terdapat multi pendekatan, keterlibatan berbagai pihak, serta konsistensi para aktor pembangun perdamaian di Timor Leste. Hal ini menjadi kesuksesan operasi perdamaian secara utuh.

Berdasarkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur yang ditanda tangani pada tanggal 5 Mei 1999 di New York di bawah naungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dilaksanakan penentuan pendapat di Timor Timur padatanggal 30 Agustus 1999. Usulan yang disampaikan oleh Presiden B.J.Habibie pada saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakorpolkam) pada tanggal 25 Januari 1999. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia-John Howard kepada Presiden RI tanggal 19 Desember 1998 mengenai perubahan sikap Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Di dalam suratnya, PM John Howard mendesak dilakukannya

Jajak Pendapat (referendum) setelah penerapan status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Perubahan sikap Australia itu berpengaruh bagi Pemerintah Republik Indonesia karena Australia sebelumnya menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendukung integrasi dan mengakui kedaulatan RI atas Timor Timur. Usulan Presiden B.J.Habibie kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Januari 1999 dan disetujui oleh para anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari referendum menurut Presiden B.J.Habibie akan berdampak positif bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Perubahan sikap Australia itu berpengaruh bagi Pemerintah Republik Indonesia karena Australia sebelumnya menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendukung integrasi dan mengakui kedaulatan RI atas Timor Timur. Usulan Presiden B.J.Habibie kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Januari 1999 dan disetujui oleh para anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari referendum menurut Presiden B.J.Habibie akan berdampak positif bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Tekanan-tekanan internasional, khususnya berasal dari PBB yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Selain itu keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan berbagai permasalahan ekonomi dan politik dalam negeri pada saat. Kebijakan Presiden B.J.Habibie mengenai Opsi tersebut merupakan suatu usaha untuk membangun citra baik sebagai

pemerintahan transisi yang reformis dan demokratis serta merupakan suatu usaha untuk membangun kembali perekonomian negara yang kacau sebagai akibat dari krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu, keputusan keluarnya Opsi tersebut juga didasari oleh sikap Presiden B.J. Habibie yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan kebebasan di atas prinsip kemerdekaan kepada setiap rakyat Indonesia. Pengambilan keputusan terhadap penyelesaian persoalan Timor Timur menurut beberapa pakar dan pengamat politik Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang gegabah. Hal itu dilandasi alasan bahwa keadaan situasi di dalam negeri Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit.

Pemerintah Portugal maupun PBB menyambut positif tawaran status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada saat Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menyampaikan usulan Indonesia tentang pemberian status khusus ini kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juli 1998. Selain itu juga diperkuat dengan berlangsungnya kembali Perundingan “Senior Official Meeting” (SOM) atau Pejabat Senior dibawah tingkat menteri di New York pada tanggal 4 –5 Agustus 1998. Dari hasil dialog tersebut ketiga pihak sepakat untuk membahas dan menjabarkan lebih lanjut usulan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai otonomi luas sebagai usaha penyelesaian persoalan Timor Timur tanpa merugikan posisi masing-masing pihak. Pada saat yang sama Sekretaris jenderal PBB juga sedang berusaha untuk meningkatkan konsultasi dengan

berbagai tokoh masyarakat Timor Timur yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan perkembangan perundingan yang telah dilakukan kepada mereka dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan rancangan naskah persetujuan tentang rancangan otonomi luas pada pertemuan dialog segitiga (*tripartite talks*) tersebut.

Tanggapan positif mengenai rancangan otonomi luas juga diberikan oleh banyak tokoh dan kalangan moderat Timor Timur. Hal ini antara lain terlihat dalam diskusi yang diprakarsai oleh East Timor Study Group (ETSG). Mereka melihat konsep otonomi luas tersebut di dalam kerangka suatu masa transisi yang cukup lama sebelum suatu penyelesaian menyeluruh melalui referendum diadakan. Otonomi luas tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Republik Indonesia, bisa juga tidak diperlukan apabila masyarakat sudah puas dengan pilihan tersebut.

Sebagaimana otonomi yang telah diterapkan di berbagai negara lain, wewenang Pemerintah Daerah Timor Timur adalah mengatur berbagai aspek kehidupan kecuali aspek pertahanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Wewenang pemberian otonomi luas terhadap masyarakat Timor Timur ini jika dilihat dan ditinjau terdapat perbedaan dan jauh lebih luas daripada kebebasan yang diberikan kepada propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Tindakan ini diambil oleh pemerintah mengingat Timor Timur memiliki kekhususan sejarah dan sosial budaya

sehingga diperlukan pengaturan yang lebih bersifat khusus. Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi tersebut mengalami perubahan karena pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tawaran otonomi luas bagi Timor Timur, Presiden B.J.Habibie mengajukan Opsi II pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi II menyebutkan bahwa jika rakyat Timor Timur menolak Opsi I tentang pemberian otonomi luas maka Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan kewenangannya kepada MPR hasil pemilu bulan Juni 1999 untuk memutuskan kemungkinan melepaskan wilayah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara terhormat, baik-baik, dan damai, serta secara konstitusional.

Hal tersebut yang membuat terbentuknya TAP MPR RI NO. V/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat di Timor Timor, bahwasanya adanya tekanan-tekanan dari internasional yang pada akhirnya Presiden pada saat waktu itu memberikan opsi tersebut dan memberikan ketetapan.